

ABSTRAK

Kedudukan para kreditor dalam kepailitan pada dasarnya adalah sama (*paritas creditorium*). Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan undang-undang kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian asas *paritas creditorium* berlaku bagi para kreditor konkuren saja. Masalah yang penting adalah bagaimana bila suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam keadaan tidak mampu membayar hutang secara keseluruhan. Dalam keadaan demikian, sektor hukum mempunyai fungsi utama dalam menyelaraskan di antara kepentingan hak dan kedudukan dari masing-masing kreditor tersebut, sehingga tercapai unsur keadilan dengan memberikan setiap kreditor bagian yang sesuai dengan haknya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pemilihan metode ini, mengingat bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan perusahaan saat ini memiliki kedudukan yang diutamakan dalam memperoleh pelunasan piutangnya. Penyelesaian utang melalui lembaga Kepailitan untuk mendapatkan pembagian yang adil bagi para kreditornya merupakan penerapan lebih lanjut dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. (2) Perlindungan hukum tenaga kerja dalam hal terjadi debitor telah dinyatakan pailit sebelum dan pasca putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 adalah sebagai berikut: sebelum putusan MK beranggapan upah buruh tetap berada di bawah kreditor separatis, pajak, biaya lelang dan fee kurator serta dianggap tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasca putusan MK kedudukan upah pekerja menurut Undang-Undang Kepailitan dan KUH Perdata didahulukan. (3) Rekonstruksi kedudukan kreditor separatis terkait putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 mengenai kedudukan tenaga kerja dalam proses kepailitan berbasis kepastian hukum yang berkeadilan adalah sebagai berikut: Apabila harta jaminan dieksekusi sendiri oleh kreditor separatis maka urutan pembayaran sisa hasil penjualan atau harta pailit yang lain tersebut akan dibayarkan kepada para kreditor dengan urutan sebagai berikut: imbalan jasa kurator dan biaya kepailitan, upah buruh, utang pajak, kreditor pemegang hak istimewa khusus, kreditor pemegang hak istimewa umum dan kreditor konkuren. Apabila kreditor separatis gagal mengeksekusi harta jaminannya dalam jangka waktu yang diperbolehkan maka urutan pembayaran hasil penjualan harta jaminan menggunakan urutan sebagai berikut: Imbalan Jasa Kurator dan Biaya Kepailitan, upah buruh, utang pajak, kreditor Separatis, kreditor pemegang hak istimewa khusus, kreditor pemegang hak istimewa umum, kreditor konkuren.

Kata Kunci : *Kreditor Separatis, Tenaga Kerja, Keadilan dan Kepastian Hukum*

ABSTRACT

In fact, the creditors' position in bankruptcy is the same (parity creditorium). However, this principle recognizes exceptions, namely the creditors who hold collateral rights over material and creditors whose rights take precedence based on the bankruptcy law and other statutory regulations. Thus the principle of creditorium parity for concurrent creditors only. The important problem is what if a company is declared bankrupt and is unable to pay its debts as a whole. In such circumstances, the legal sector has the main function of aligning the interests of the rights and positions of each creditor, so that justice is achieved by giving each creditor a share in accordance with their rights.

The research method used in this research is normative legal research method. The choice of this method, considering that legal research is a process to find legal rules, legal principles, and legal doctrines in order to answer legal issues at hand.

The results of this study conclude that (1) the position of the separatist creditors in the company's bankruptcy currently has a preferred position in obtaining repayment of their debts. Debt settlement through the Bankruptcy institution to obtain a fair share for creditors is a further application of Articles 1131 and 1132 of the Civil Code. (2) Manpower legal protection in the event that the debtor has been declared bankrupt before and after the Constitutional Court decision No. 67 / PUU-XI / 2013 are as follows: prior to the decision of the Constitutional Court, it was assumed that workers' wages were still under the separatist creditors, taxes, auction fees and curator fees and were deemed not to contradict Article 28D paragraph (1) and paragraph (2) of the NRI Year 1945. After the Constitutional Court decision, the position of workers' wages according to the Bankruptcy Law and the Civil Code takes precedence. (3) Reconstruction of the position of the separatist creditor in relation to the Constitutional Court decision No. 67 / PUU-XI / 2013 regarding the position of workers in the bankruptcy process based on fair legal certainty are as follows: If the collateral is executed by a separatist creditor, the order of payment for the remaining proceeds from the sale or other bankruptcy assets will be paid to the creditors in the order as follows: fees for curatorial services and bankruptcy fees, labor wages, tax payable, creditors with special privileges, creditors with general privileges and concurrent creditors. If a separatist creditor fails to execute the collateral within the time allowed, the order of payment of the proceeds from the sale of the collateral is in the following order: Curator Fee and Bankruptcy Fee, labor wages, tax payable, Separatist Creditors, Creditors with special privileges, Creditors with special privileges. general, concurrent creditors.

Keywords: Separatist Creditors, Labor, Justice and Legal Security